



Dominasi Kekuasaan Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Poso

Dominance of Power in the Regional Government of Poso Regency

Munari^{1*}, Yunus², Lulu Helmalia Melani³

¹Administrasi Publik, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

^{2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: munaribudiawan867@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 12 Nov, 2025

Accepted: 11 Dec, 2025

Kata Kunci:

Dominasi Kekuasaan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Poso

Keywords:

*Dominance of Power of the
Poso Regency Regional
Government*

DOI: [10.56338/jks.v8i12.8029](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.8029)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kekuasaan yang terjadi di dalam pemerintahan Daerah di Kabupaten Poso. Dimana dominasi kekuasaan dapat diartikan sebagai keadaan dimana kekuasaan terkonsentrasi pada individu. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang dominasi kekuasaan pemerintah Poso dengan menggunakan konsep habitus, modal, arena dan praktik dari Pierre Bourdieu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan kunci observasi lapangan dan analisis dokumen terkait. Selain wawancara, data sekunder juga dikumpulkan melalui dokumentasi, untuk memberikan konteks tambahan bagi analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan dalam pemerintah di kabupaten Poso terbentuk melalui jaringan social yang kuat. Pemanfaatan moda politik serta penguasaan arena politis lokal. Struktur kekuasaan yang dibangun memberikan stabilitas politis tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dominasi kekuasaan ini tidak hanya tercermin dalam pola kepemimpinan yang diwariskan secara turun temurun. Tetapi juga dalam sistem birokrasi dan jaringan politik yang mereka bangun. Modal social berupa hubungan yang kuat dengan aktor-aktor politik modal ekonomi yang mendukung keberlanjutan dominasi serta modal budaya yang memperkuat legitimasi kepemimpinan.

ABSTRACT

This study discusses the power that occurs in the regional government in Poso Regency. Where the dominance of power can be interpreted as a state where power is concentrated in an individual. Therefore, the purpose of this study is to discuss the dominance of power in the Poso government using the concept of habitus, capital, arena and practice from Pierre Bourdieu. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where data is collected through indepth interviews with six key informants, field observations and analysis of related documents. In addition to interviews, secondary data is also collected through documentation, to provide additional context for the analysis. The result of this study indicate that the dominance of power in the government in Poso Regency is formed through a strong social network. Utilization of political modes and control of the local political arena. The power structure that is built provides political stability but also poses challenges to democracy and community participation. This dominance of power is not only reflected in the leadership patterns that are inherited from generation to generation. But also in the bureaucratic system and political network that they build. Social capital takes the form of strong relationships with political actors, economic capital that supports the sustainability of domination, and cultural capital that strengthens the legitimacy of leadership.

PENDAHULUAN

Dominasi kekuasaan sering kali dikaitkan dengan pemanfaatan modal sosial oleh kelompok dominan. Modal sosial mencakup jaringan relasi, kepercayaan, dan norma yang digunakan untuk memperkuat posisi kekuasaan. Selain modal sosial, modal ekonomi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dominasi kekuasaan. Kelompok dominan sering kali memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan politik mereka.(JONI, 2020). Dalam beberapa kasus, dominasi kekuasaan juga dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kelompok dominan cenderung mengendalikan informasi dan pengambilan keputusan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Namun, dominasi kekuasaan tidak selalu bersifat negatif. Dalam beberapa konteks, dominasi ini dapat memberikan stabilitas politik, terutama di daerah yang memiliki sejarah konflik seperti Poso.

Dalam pemerintahan di Poso, dominasi kekuasaan menjadi salah satu isu yang penting untuk dikaji. Fenomena ini memengaruhi berbagai aspek, termasuk distribusi sumber daya, partisipasi politik masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Secara historis, Poso dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman budaya. Namun, potensi ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal karena masalah dalam pengelolaan pemerintahan. Di Poso, dominasi kekuasaan menjadi fenomena yang menonjol, dengan beberapa keluarga memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Keluarga Ingkiriwang, misalnya, telah lama menjadi aktor dominan dalam politik lokal. Secara umum, dominasi kekuasaan dapat memengaruhi pemerintahan dalam berbagai cara. Di satu sisi, dominasi ini dapat memberikan stabilitas politik dan kesinambungan kebijakan. Namun, di sisi lain, dominasi kekuasaan juga dapat menciptakan ketimpangan dan melemahkan partisipasi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dominasi kekuasaan dalam pemerintahan telah dilakukan namun penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pola patronase masih sangat kuat dalam masyarakat. (Jabbar dkk., 2022). Sebagai contoh, salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Hadi, 2018) hanya menyoroti Hasil penelitian mengenai legitimasi kekuasaan dan hubungan penguasa dengan rakyat dalam konteks pemikiran politik suku Dayak Ma'anyan. Pemikiran politik ini pernah dipraktikkan di masa lalu dalam kehidupan masyarakat suku pada masa kerajaan Nan Sarunai dan sesudahnya, dan kini mereka warisi. Sebagian pemikiran itu sudah tidak dipraktikkan lagi dan hanya melekat dalam sejarah pemikiran saja. Akan tetapi, desentraliasi dan demokrasi sejak kejatuhan Soeharto tahun 1998, memberi peluang bagi mereka mempraktikkan kembali beberapa konsep pemikiran itu yaitu seperti keabsahan atau legitimasi kekuasaan serta konsep hubungan penguasa dengan rakyat dalam kekuasaan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk lebih memahami bagaimana dominasi kekuasaan di suatu daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman dan memperkaya wawasan tentang dominasi kekuasaan dalam pemerintah daerah di Kabupaten Poso. Dengan memahami bagaimana dominasi kekuasaan di suatu daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam pemerintahan daerah, distribusi sumber daya, partisipasi politik masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam sistem pemerintahan Yasir et al, (2023). Dengan demikian penelitian ini relevan dalam memperkaya kajian tentang sistem pemerintahan, khususnya pada aspek dominasi kekuasaan dalam pemerintah daerah di Kabupaten Poso dan dapat memberikan stabilitas politik dan kesinambungan kebijakan.

METODE

Dasar penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam dominasi kekuasaan dalam pemerintah daerah di Kabupaten Poso. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

mendalam dan dokumentasi. (Achjar et al,2023) wawancara dilakukan dengan enam informan kunci yang dipilih secara *purposive*. Dimana individu yang yang terpilih memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dominasi kekuasaan dalam pemerintah daerah di Kabupaten Poso, sehingga informasi yang diperoleh lebih relevan dan mendalam (Rukin,2021). Selain wawancara sekunder juga dikumpulkan melalui dokumentasi, untuk memberikan konteks tambahan bagi analisis (Sarosa,2021). dengan Analisis data menurut (Wijaya, 2019) adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen secara sistematis, menyusun data ke dalam kategori, menjabarkannya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusunnya menjadi model. apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh Anda dan orang lain. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis data yang di kembangkan oleh Miles, Huberman, Sandana (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi kekuasaan dalam pemerintahan merupakan suatu kondisi di mana aktor politik tertentu memiliki kontrol yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, dan pengaruh politik dalam suatu wilayah. Di Kabupaten Poso, dominasi kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh keluarga politik tertentu yaitu keluarga piet inkiriwang, yang terus mempertahankan kekuasaan melalui berbagai mekanisme.

Dari perspektif teori dominasi kemunculan dinastisme disebabkan karena adanya peluang dominasi dari kelas penguasa terhadap kelas yang dikuasai. Mosca (1969) dalam karyanya yang terkenal dengan *The Rulling Class*, menyatakan bahwa: Dalam setiap masyarakat terdapat du akelas penduduk. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas yang pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa dalam masyarakat terdapat du akelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas yang pertama yang menguasai fungsi politik, yakni memonopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama oleh cara-cara tertentu. Mengenai kelas atau kelompok yang berkuasa dan dikuasai.

Kelas pertama (berkuasa) biasanya terdiri dari orang-orang yang sedikit jumlahnya, menerapkan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dengan menikmati segala keuntungan dari kedudukan sebagai pemegang kekuasaan. Kelas yang kedua (dikuasai), terdiri dari lebih banyak orang, diarahkan dan dikendalikan oleh oleh kelas-kelas pertama, dengan cara-cara kurang lebih legal, sewenang-wenang atau dengan kekerasan. Sedangkan kelas kedua menyediakan saran untuk dapat hidup dan bertahan serta hal-hal lainnya yang sangat penting bagi organisasi politik. Kelas penguasa (kekuasaan elit) menurut Mosca (1969) sebagai akibat sifat-sifat yang tak terbantahkan dari watak social manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa kelas politik yang tidak adaptative dengan zaman tidak akan bisa mempertahankan diri. Sementara elit lain akan terbentuk dari kalangan yang diperintah, dan dengan perjalanan waktu akan mengambil alih kekuasaan meskipun dengan kekerasan. Oleh karena semua kelompok penguasa harus mempertahankan sistem pewaris secara turun temurun agar tetap dapat memanipulasi kekuasaannya. Namun rekrutmen dari kelas mayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitas organisasi politik. Dalam sebuah bentuk dominasi kekuasaan dalam pemerintahan di Kabupaten Poso dari kelas minoritas terhadap kelas mayoritas. Dominasi diartikan sebagai penguasaan, penempatan posisi bagus dan kuat pengaruh besar. Dalam kata lain dominasi di terapkan untuk menunjukkan posisi negara-negara kota secara individual.

Kelas penguasa itu adalah negara melalui kekuasaan pemerintahan. Negara menurut Offe dan Ränge, tidak memajukan kepentingan tertentu dan tidak beraliansiasi dengan kelas tertentu.

Sebaliknya, yang dilindungi dan dimajukan oleh negara adalah seperangkat peraturan dan hubungan social yang dianggap tercakup dalam kekuasaan kelas kapitalis. Negara tidak membela kepentingan satu kelas tertentu, tetapi kepentingan Bersama semua anggota masyarakat kelas kapitalis yang di sebut sebagai alat kekuasaan. Dari sisi politik kekuasaan, dinastisme mengindikasikan agar kesalahan yang di perbuat kepala daerah sebelumnya dapat diamankan oleh sosok kepala daerah berikutnya sehingga istri atau saudaranya-lah yang kemudian harus menjadi kepala daerah. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok individu untuk membatasi keinginan kelompok lain dan mencegah keinginnya dikuasai oleh kelompok lain tersebut.

Kekuasaan dalam pemerintahan di Kabupaten Poso selalu ambigu, mempesona sekaligus menakutkan. Mempesona karena seseorang penguasa dapat mengatur dan mengendalikan. Menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas masyarakat, merampas kebebasan masyarakat. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Menurut Cronin (1996), menunjukkan pengertian kekuasaan sebenarnya yang memandang secara substansif-tertanam dalam, dijalankan oleh dan terhadap-subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beropersinya kekuasaan.

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan social dan politik. Kelompok kecil itu disebut elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Lebih jauh membagi masyarakat dalam dua kelas yaitu pertama elit memerintah (*governing elite*) dan yang tidak memerintah (*non governing elite*). Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mementingkan kepentingannya sendiri. Kekuasaan adalah probabilitas untuk mempengaruhi kebijakan dan kegiatan negara, atau probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif. Seseorang pembuat yang paling berkuasa sekaligus harus memperhitungkan kemungkinan-keungkinan reaksi dari yang lain. Sebab-sebab dinastiisme dari perspektif hegemoni atau dominasi elit adalah sebagai berikut:

Petahanan sebagai kelas elit (*governing elite*) memiliki peluang yang lebih besar mendominasi proses pemilihan umum sehingga politik dinasti menjadi sulit dihindari.

Petahanan sebagai kelas elit (*governing elite*) menjalankan semua fungsi politis, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang di berikan oleh kekuasaan.

Masyarakat pemilih (*non governing elite*) diatur dan dikendalikan oleh petahanan sebagai kelas elit.

Dominasi kekuasaan di Kabupaten Poso memunculkan berbagai tantangan yang memengaruhi dinamika pemerintahan lokal. Salah satu tantangan utama adalah terciptanya oligarki politik, di mana kekuasaan hanya berada di tangan segelintir kelompok atau individu yang memiliki modal besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Fenomena oligarki politik ini sering kali menghambat regenerasi kepemimpinan. Ketika hanya kelompok tertentu yang mendominasi, peluang bagi individu lain yang kompeten namun tidak memiliki akses ke modal dominan menjadi sangat terbatas. Hal ini berdampak pada stagnasi ide-ide baru yang seharusnya dapat mendorong inovasi dalam pemerintahan. Selain itu, dominasi kekuasaan juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ketika pengambilan keputusan lebih didasarkan pada kepentingan kelompok dominan, kebutuhan masyarakat luas sering kali terabaikan. Proyek-proyek pembangunan lebih diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok dominan daripada menjawab kebutuhan masyarakat secara merata. Salah satu contoh nyata adalah alokasi anggaran daerah yang sering kali tidak mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur misalnya, lebih banyak difokuskan pada wilayah

yang mendukung basis politik kelompok dominan. Hal ini menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Poso.

Habitus Politik dalam Dominasi Kekuasaan di Kabupaten Poso

Dalam konteks dominasi kekuasaan di Kabupaten Poso, habitus menjadi faktor utama yang memungkinkan elite politik, khususnya keluarga Ingkiriwang, untuk mempertahankan dominasi mereka dalam pemerintahan daerah. Keluarga ini memiliki pola pikir dan tindakan yang telah dibentuk oleh pengalaman panjang mereka dalam politik lokal, menciptakan suatu tradisi politik yang diwariskan secara turun-temurun. Habitus yang terbentuk dalam lingkup ini mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika pemerintahan daerah, kemampuan dalam membangun serta memelihara jaringan politik yang luas, serta keterampilan dalam mengelola sumber daya pemerintahan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan.

Dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga Ingkiriwang di Kabupaten Poso tidak semata-mata didasarkan pada penguasaan terhadap jabatan politik, tetapi juga pada kontrol terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan habitus politik yang telah mengakar, mereka mampu mengendalikan proses kebijakan publik, mengarahkan distribusi sumber daya, serta menciptakan struktur pemerintahan yang memastikan kesinambungan kekuasaan mereka. Politik patronase menjadi salah satu instrumen utama dalam mempertahankan dominasi ini, di mana loyalitas politik dibangun melalui pemberian akses terhadap sumber daya dan fasilitas pemerintahan. Dominasi kekuasaan ini juga tercermin dalam bagaimana pemerintahan daerah dikelola, di mana kebijakan yang diambil sering kali berorientasi pada mempertahankan status kekuasaan mereka. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memastikan stabilitas politik, tetapi juga untuk mempersempit ruang oposisi serta mengontrol dinamika politik di tingkat lokal. Dalam praktiknya, struktur birokrasi pun sering kali diisi oleh individu-individu yang memiliki keterkaitan dengan keluarga Ingkiriwang, sehingga memperkuat jaringan loyalitas yang menopang sistem dominasi mereka.

Modal Sosial dan Budaya dalam Dominasi Kekuasaan di Kabupaten Poso

Modal sosial dalam bentuk jaringan dan hubungan yang luas memainkan peran strategis dalam mempertahankan kekuasaan. Dengan membangun hubungan erat dengan berbagai aktor politik, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta kelompok pemuda, suatu kelompok politik dapat mengamankan dukungan dan memperkuat koalisi yang solid. Keluarga Ingkiriwang sebagai aktor dominan dalam politik lokal telah berhasil memanfaatkan kombinasi modal ekonomi, budaya, dan sosial untuk mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan daerah. Dukungan finansial yang kuat memungkinkan mereka mengelola sumber daya dengan efektif, sementara pemahaman politik yang mendalam membantu mereka merancang strategi yang sesuai dengan dinamika lokal. Jaringan sosial yang luas semakin memperkuat posisi mereka dengan mengamankan dukungan dari berbagai pihak.

Modal ekonomi mengacu pada aset finansial dan sumber daya material yang memungkinkan suatu kelompok politik untuk mengelola kampanye, membangun jaringan dengan elite lokal, serta mempertahankan pengaruh politik. Dalam dominasi kekuasaan, modal ekonomi sering digunakan untuk membangun citra politik yang kuat, mendanai kampanye, dan memperluas pengaruh terhadap berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, modal budaya juga menjadi faktor penting dalam dominasi kekuasaan. Pemahaman mendalam terhadap sistem politik dan pemerintahan, pengalaman dalam birokrasi, serta latar belakang pendidikan tinggi menjadi alat bagi suatu kelompok untuk memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan. Kemampuan menyesuaikan strategi politik dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat juga memberikan keuntungan dalam membangun legitimasi kepemimpinan. Mencakup sumber daya sosial yang digunakan oleh aktor politik untuk

mempertahankan posisinya. Di Kabupaten Poso, modal sosial berupa jaringan keluarga dan komunitas lokal menjadi alat utama dalam menjaga dominasi politik.

Arena Politik dalam Dominasi Kekuasaan di Kabupaten Poso

Arena ini bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga sebuah medan di mana berbagai aktor berinteraksi dan berkompetisi dengan memanfaatkan berbagai modal untuk mencapai tujuan mereka. Dalam konteks politik, arena ini mencakup hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam sistem politik yang lebih luas, di mana dominasi dan kontrol atas sumber daya sosial, ekonomi, dan politik menjadi hal yang sangat penting. (Ningtyas, 2015) arena yang sangat dinamis. Mereka memanfaatkan berbagai bentuk modal untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem politik daerah, termasuk modal sosial, budaya, dan ekonomi. Arena sangat relevan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan diperebutkan dan dipertahankan oleh aktor-aktor politik, khususnya keluarga Ingkiriwang. Keluarga ini telah lama menjadi bagian integral dari struktur politik lokal dan beroperasi dalam ruang di mana aktor politik bersaing untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Di Kabupaten Poso, arena politik didominasi oleh keluarga yang memiliki kendali terhadap sumber daya ekonomi dan politik, serta pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan.

Praktik Politik dalam Dominasi Kekuasaan di Kabupaten Poso

Rina Keumuning Retnawati, (2018). Praktik dalam pemerintah secara nyata pelaksanaa pekerjaan dan perbuatan melakukan keyakinan. Sejalan dengan itu praktik adalah pelaksanaan untuk memperoleh keterampilan. Praktik sebagai hasil dinamika dialektis antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Eksterior adalah struktur objektif yang ada diluar pelaku social. Sedangkan interior merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku social. Dengan demikian, segala sesuatu yang diamati dan dialami yang ada diluar diri pelaku social (interior) bergerak dinamis secara dialektis dengan pengukapan dari segala sesuatu yang telah dinternalisasi menjadi bagian dari diri pelaku sosial, (interior), paraktik ini terdapat dalam ruang dan waktu. sebagai hasil dinamika dialektis antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Eksterior adalah struktur objektif yang ada diluar pelaku sosial. Sedangkan interior merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku social. Dengan demikian, segala sesuatu yang diamati dan dialami yang ada diluar diri pelaku social (interior) bergerak dinamis secara dialektis dengan pengukapan dari segala sesuatu yang telah dinternalisasi menjadi bagian dari diri pelaku sosial, (interior), paraktik ini terdapat dalam ruang dan waktu.

Keinginan seseorang menampilkan dirinya dihadapan orang lain, dan bagaimana seseorang membangun identitas dihadapan lingkungan sosialnya. Dengan pemerintahannya sendiri memunculkan habitus yang tidak bisa dilepaskan dengan ranah atau pertaruhan. Konsep ini sangat terikat satu sama lain karena saling mempengaruhi hubungan dua arah : struktur-struktur objektif (struktur-struktur bidang social) dan struktur-struktur habitus yang terintegrasi pada pelaku.perjuangan dan modal-modal yang ada mereka gunakan agar keberadaan lebih diakui oleh masyarakat.

Pemerintah kabupaten Poso adalah pemerintah daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonstrasi dalam mengelola sendiri urusan pemerinthannya berdasarkan asas otonomi. Kabupaten poso di pimpin oleh seseorang bupati yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang 1945. Secara historis, penduduk kabupaten poso berada di bawah kekuasaan raja-raja, antara lain Raja Poso, Napu, Mori, Tojo, Una-una dan Bangku. Kerjaan-kerjaan tersebut tidak memiliki hubungan apapun. Wilayah bagian selatang berada di bawah kekuasaan raja luwu, bagian utara berada di bawah kekuasaan raja sigi, dan bagian Timur, termasuk wilayah Bungku, berada di bawah kekuasaan raja Ternate.

Namun jika dilihat dari perspektif sejarah masa ini merasa terpinggirkan oleh dominasi kekuasaan para pendatang sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan social di Kabupaten

Poso. Masyarakat di Kabupaten Poso merasa kehilangan jati diri dalam hal status sosial. Konflik yang terjadi di Kabupaten Poso diduga kuat disebabkan oleh adanya dominasi kekuasaan yang diprovokasi oleh elite politik dengan menggunakan isu-isu kekuasaan yang sensitif. Dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas yang pertama yang menguasai fungsi politik, yakni memonopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama oleh cara-cara tertentu. Mengenai kelas atau kelompok yang berkuasa dan dikuasai.

Dominasi kekuasaan di Kabupaten Poso memunculkan berbagai tantangan yang memengaruhi dinamika pemerintahan lokal. Salah satu tantangan utama adalah terciptanya oligarki politik, di mana kekuasaan hanya berada di tangan segelintir kelompok atau individu yang memiliki modal besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Fenomena oligarki politik ini sering kali menghambat regenerasi kepemimpinan. Ketika hanya kelompok tertentu yang mendominasi, peluang bagi individu lain yang kompeten namun tidak memiliki akses ke modal dominan menjadi sangat terbatas. Hal ini berdampak pada stagnasi ide-ide baru yang seharusnya dapat mendorong inovasi dalam pemerintahan.

Selain itu, dominasi kekuasaan juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ketika pengambilan keputusan lebih didasarkan pada kepentingan kelompok dominan, kebutuhan masyarakat luas sering kali terabaikan. Proyek-proyek pembangunan lebih diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok dominan daripada menjawab kebutuhan masyarakat secara merata. Salah satu contoh nyata adalah alokasi anggaran daerah yang sering kali tidak mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur misalnya, lebih banyak difokuskan pada wilayah yang mendukung basis politik kelompok dominan. Hal ini menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Poso.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan dalam pemerintahan Kabupaten Poso masih didasarkan pada struktur politik yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terutama keluarga Ingkiriwang. Dengan memanfaatkan modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik, keluarga ini berhasil mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan. Penting bagi sistem politik di Kabupaten Poso untuk lebih membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis. Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam proses politik agar tercipta keseimbangan dalam distribusi kekuasaan. Transparansi dalam pemerintahan dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi langkah yang harus diperkuat guna memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu, tetapi dapat diakses oleh semua pihak yang berkompeten.

Dominasi kekuasaan ini tidak hanya tercermin dalam pola kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dalam sistem birokrasi dan jaringan politik yang mereka bangun. Modal sosial berupa hubungan yang kuat dengan aktor-aktor politik, modal ekonomi yang mendukung keberlanjutan dominasi, serta modal budaya yang memperkuat legitimasi kepemimpinan, menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas kekuasaan mereka di Kabupaten Poso. juga cenderung berpihak kepada kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, sehingga menciptakan ketimpangan dalam pelayanan publik. Namun, di sisi lain, dominasi kekuasaan ini juga memberikan stabilitas politik yang relatif terjaga di Poso. Dalam konteks daerah yang memiliki sejarah konflik, kesinambungan kepemimpinan dari kelompok yang sama dapat menjadi faktor stabilisasi yang mencegah ketidakpastian politik. Akan tetapi, dalam jangka panjang, model kekuasaan yang terlalu terpusat pada kelompok tertentu berisiko melemahkan demokrasi lokal dan menghambat regenerasi kepemimpinan.

Dalam dinamika politik lokal, fenomena ini berdampak pada keterbatasan partisipasi politik masyarakat secara luas. Struktur kekuasaan yang terpusat membuat akses terhadap jabatan politik dan pengambilan keputusan lebih sulit dijangkau oleh kelompok di luar lingkaran kekuasaan. Selain itu, distribusi sumber daya pembangunan, Dengan demikian, dominasi kekuasaan dalam pemerintahan Kabupaten Poso bukan hanya menjadi fenomena politik semata, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika sosial dan budaya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem politik yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K.A.H., Rusliyadi, Mzaenurrosyid, A., Rumata, N.A., Nirwana, I., Abadi, A., (2023). Metode penelitian Kualitatif; *Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agus Suntoro, 2020. Omnibus Law: *Dominasi Kekuasaan Eksekutif Dalam Pembentukan Legislasi*.
- Alimah, N., Nur Fitriani, O., Mutmainnah, S., Vira Nurjannah, O., & Abbas, N. (2024). *Dominasi Keluarga Barmaki, Buwaihi, dan Saljuki dalam Dinamika Politik Abbasiyah*. *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2(4), 48–59. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v2i4.1232>.
- Bourdieu, Pierre Buodieu. (1977). *Outlite Of Theory Of Practise*, London, Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (2017). Habitus. Dalam *Habitus: A sense of place* (hlm. 59–66). Routledge.
- Ciaran. (1996). Bourdieu and Foucault om Power and Modernity. *Philosophy Social Criticism*, Vol. 22: 55-85.
- Dinas Kominfo dan Persandingan Kabupaten Poso, 2011. *Sejarah Kabupaten Poso*. Pemerintah Kabupaten Poso.
- Efendi Berutu, dalam Nomensen Sinamo (2010), *hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta: Pustaka Mandiri
- Frans Magnis- Suseno, 2003, *Dalam Bayangan Lenin, Enam Pemikir Marxime dari Lenin Sampai Ta Malaka*, Gramedia, Jakarta.
- Hadi, (2018). *Legitimasi Kekuasaan dan Hubungan Penguasa-Rakyat dalam Pemikiran Politik Suku Dayak MAa 'anyan*
- Jabbar dkk., (2020).” *Kekuasaan dan Legitimasi: Studi Tentang Dominasi Kekuasaan Keturunan Arung Gantarang IX di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*”
- Jabbar dkk., (2022). *Kekuasaan dan Legitimasi: Studi Tentang Dominasi Kekuasaan Keturunan Arung Gantarang IX di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*
- Jabbar, A. R. A. A., Tajuddin, M. S., & Fajar, F. (2022). *Kekuasaan dan Legitimasi: Studi Tentang Dominasi Kekuasaan Keturunan Arung Gantarang IX di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 130–147.
- JONI, A. (2020). *Relasi Modal dan Kekuasaan Politik, (Studi Terhadap Kemenangan Pasangan Calon Samahuddin – La Ntau dalam Perhelatan Pilkada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017)*. *Kekuasaan Politik dan Dampaknya terhadap Masyarakat*. (2024).
- Khariuddin Tahmid, *Dekonstrasi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peartuuran Perundang-undangan Indonesia*, (Yogyakarta; ringkasan disentrasi program doctor UII, 2011)
- Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, (2014). *Qualitative Data Analysis*. Arizona State University.
- Miles, M,B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitive Data Analysis: A Methods Soucebook*. Sage publications.
- Miriam Budiardjo, (1991). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan Jakarta.
- Mosca, Gaetano, *The Rulling Elite*, London; Penguin Book, 1969.

- Mustafa, Zainal, (2013). *Mengurai Varibel hingga Instrumentasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ningtyas, E. (2015). *Pierre bourdieu, language and symbolic power*. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 3(2).
- Permana Y.S, (2019). BAB XIV Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Luas Bagi Daerah antara Kohesi Negara Bangsa dan Pemenuhan Kesejahteraan. *Menimbang Demokrasi dua Dekade Reformasi*, 435.
- Riki, 2020. HUT 125 Tahun, Poso Kota Sejarah. Kaili Post. Kailipost/2020/03hut125 Tahun Poso Kota Sejarah. Html
- Rina Kemuning Retnawati, (2018). *Praktik Sosial Komunitas Punk Black Water Street Crew Di Kota Samarinda*.
- Rukin, S.P., (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Jakad Media Publishing.
- Sadirman, (2013). *Interaksi dan Motivasi Belajar ilmu Pemerinthan*. Jakrta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Sarosa, S., (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt. Kanisius.
- Wijaya (2019) *Analisis data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah tinggi Theologia Jaffray.
- Wuriyani, E. P. (2020). *Mengenalkan Pemikiran Pierre Bourdieu untuk Sastra*. *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 7(1), 1–10.
- Yasir, Y., Firzal, Y., Yesicha, C., Sulistyani, A., 2023 *Environmental Communication Based On Local Wisdom In Forest Conservation: A Study On Sentajo Forbidden Forest, Indonesia*. *J. Landsc. Ecol.* 15,127-145.